



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-384/KN/2020 09 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu set
Hal : Permohonan Pengalokasian Biaya Pendampingan Pensertipikatan BMN
berupa tanah Tahun 2021

Yth. (Terlampir)

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyampaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan kepada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor S-110/KN/2020 tanggal 14 Februari 2020 hal Penyampaian usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021.
2. Melalui surat tersebut, kami menyampaikan bahwa target pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, kami baru dapat menyampaikan daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang.
3. Menindaklanjuti surat tersebut telah disampaikan Surat Nomor S-373/KN/2020 tanggal 4 Juni 2020 hal Penyampaian perubahan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, yang pada intinya meminta agar Kementerian ATR/BPN mengalokasikan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah yang diperkirakan akan terbit menjadi 27.094 sertipikat.
4. Terdapat kenaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 disebabkan sebagian target tahun 2020 dicarry over ke tahun 2021, karena adanya penghematan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020 yang semula dianggarkan sebanyak 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna mempercepat penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah, kiranya Saudara dapat mengalokasikan anggaran untuk persiapan (pra sertifikasi) dan pendampingan pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA K/L TA 2021 sesuai target bidang terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Isa Rachmatarwata

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN



Lampiran I
Surat Dirjen Kekayaan Negara
Nomor : S- /KN/2020
Tanggal : Juni 2020

DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI
Jakarta
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Jakarta
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung
Jakarta
5. Yth. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
Jakarta
6. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Jakarta
7. Yth. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan
Jakarta
8. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum & HAM
Jakarta
9. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Jakarta
10. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jakarta
11. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Jakarta
12. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Jakarta
13. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Jakarta
14. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
15. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Jakarta
16. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Jakarta

17. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta
18. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta
19. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta
20. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jakarta
21. Yth. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/ Sekretaris Utama Badan Riset
dan Inovasi Nasional
Jakarta
22. Yth. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
Jakarta
23. Yth. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
Jakarta
24. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
Jakarta
25. Yth. Asisten Kapolri Bidang Logistik Kepolisian Negara RI
Jakarta Timur
26. Yth. Sekretaris Utama Badan POM
Jakarta
27. Yth. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
Jakarta
28. Yth. Sekretaris Utama BMKG
Jakarta
29. Yth. Sekretaris Utama Komisi Pemilihan Umum
Jakarta
30. Yth. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Jakarta
31. Yth. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta
32. Yth. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Jakarta
33. Yth. Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Batam
34. Yth. Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Sabang
35. Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI
Jakarta

36. Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
Jakarta

37. Yth. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
Jakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-373/KN/2020 04 Juni 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu set
Hal : Penyampaian Perubahan Usulan Daftar Indikatif Bidang Tanah Yang Akan Disertipikatkan Tahun 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN

Menindaklanjuti surat kami Nomor S-110/KN/2020 tanggal 14 Februari 2020 hal Penyampaian usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, kami menyampaikan bahwa target pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, kami baru dapat menyampaikan daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang.
2. Terkait dengan angka 1, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah Antara Jajaran DJKN dan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2020 bertempat di Harris Vertu Hotel Jakarta guna membahas usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021.
3. Sebagaimana kita ketahui anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020 dilakukan penghematan dan refocusing sehingga terjadi pengurangan target pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2020 dari 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang. Dengan demikian, sebagian target tahun 2020 akan dicarry over ke tahun 2021.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna mempercepat penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah, dengan ini disampaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan sebanyak 27.560 bidang tanah yang diperkirakan akan terbit 27.094 sertipikat (rincian soft copy terlampir).
5. Mempertimbangkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat mengalokasikan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2021 atas seluruh bidang yang kami usulkan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Isa Rachmatarwata

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Lampiran II
 Surat Dirjen Kekayaan Negara
 Nomor S- /KN/2020
 Tanggal Juni 2020

No	Kode BA	NAMA K / L	Usulan Indikatif	Carry Over	Total Indikatif 2021
1	2	3	4	5	6=4+5
1	001	MPR RI	1	-	1
2	002	DPR RI	1	-	1
3	005	MAHKAMAH AGUNG	14	9	23
4	006	KEJAKSAAN RI	3	2	5
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	7	-	7
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5	-	5
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	560	286	846
8	013	KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA	18	9	27
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13	29	42
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	194	14	208
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1	1	2
12	020	KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	8	-	8
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	528	45	573
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	30	5	35
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5	1	6
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	168	101	269
17	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA	1	-	1
18	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	34	12	46
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	6	12	18
20	033	KEMENTERIAN PUPR	17.771	6.968	24.739
21	042	KEMENTERIAN RISTEKDIKTI	14	23	37
22	051	BADAN SIBER & SANDI NEGARA	2	-	2
23	054	BADAN PUSAT STATISTIK	9	4	13
24	056	KEMENTERIAN ATR/BPN	1	-	1
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	391	83	474
26	063	BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN	-	1	1
27	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2	-	2
28	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, & GEOFISIKA	4	1	5
29	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6	3	9
30	079	LIPI	7	-	7
31	081	BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAN TEKNOLOGI	2	-	2
32	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4	-	4
33	087	ARSIP NASIONAL RI	1	-	1
34	112	BPKPBPB BATAM	64	17	81
35	116	LPP RRI	2	-	2
36	117	LPP TVRI	5	1	6
37	118	BPKS SABANG	51	-	51
TOTAL			19.933	7.627	27.560